



'Evaluasi PTM Harus Secara Berkala'

Dalam evaluasi PTM, tiap daerah bisa menerapkan standar yang tidak sama.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melihat, kasus Covid-19 cenderung fluktuatif setiap harinya. Hal ini membuat pemerintah harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka (PTM).

"Menyikapi Covid-19 pada saat naik ini, pemerintah mengevaluasi perlunya PTM hanya 50 persen. Kita tidak tahu kemudian satu atau dua hari ke depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/2).

Ia melihat, kasus Covid-19 di Indonesia dapat sewaktu-waktu meningkat ataupun melandai. Hal inilah yang membuat pemerintah harus terus melakukan evaluasi kebijakan setiap adanya fluktuasi kasus positif. "Ini akan terus dimonitor pemerintah untuk diambil langkah-langkah soal

PTM," ujar Dasco.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga mendukung langkah pemerintah mengevaluasi PTM di semua jenjang sekolah. "Varian omikron yang saat ini mewabah telah mengakibatkan munculnya gelombang ketiga Covid-19. Demi kebaikan semua dan melindungi anak-anak sekolah maka sepatutnya dilakukan evaluasi PTM," kata Jazilul.

Dia menilai, dalam evaluasi PTM, masing-masing daerah menerapkan standar yang tidak sama, sesuai level. Sehingga, ada yang menutup total dan ada yang tetap menjalankan PTM dengan kapasitas 50 persen.

Menurut dia, meskipun PTM dievaluasi, perlu didorong agar proses pendidikan tetap berjalan sehingga yang masih memberi kapasitas 50 persen harus bersyukur dan yang tutup total perlu dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Karena itu, dia mendorong pendidikan tetap berlangsung seperti pengurangan kapasitas maupun PJJ karena pendidikan bagi anak-anak sangat penting sebagai generasi penerus bangsa. "Pendidikan terhenti maka akan bisa menyebabkan *lost learning* dan *lost generation*. Ini yang kita khawatirkan, ancaman ini muncul ketika pandemi terjadi," ujar dia.

Dia menjelaskan, selama pandemi, pemerintah pernah menerapkan PJJ. Meskipun masih ada kekurangan, cara tersebut merupakan solusi ketika masyarakat diminta tidak membuat kerumunan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta jajarannya, baik Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) maupun Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meninjau ulang PTM seiring meningkatnya kasus Covid-19.

"Jaga protokol kesehatan dan jangan lengah, insya Allah, kita bisa mengatasinya," ujar Haedar.

Haedar mengatakan kenaikan kasus Covid-19 yang diakibatkan va-

rian omikron mesti menjadi perhatian bersama. Maka dari itu, ia meminta agar MCCC dan Dikdasmen mengawal pelaksanaan PTM, utamanya di institusi pendidikan milik Muhammadiyah.

Siap dihentikan

Sementara, PTM di Kota Yogyakarta siap disetop jika ditemukan kasus positif di sekolah. PTM di Yogyakarta saat ini sudah tidak menggelar PTM 100 persen, tapi dikurangi dengan kapasitas 50 persen sejak pekan kemarin.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, penyetopan PTM ini dilakukan selama sepekan. Berdasarkan hasil evaluasi PTM yang sudah dilakukan, kasus positif yang ditemukan di sekolah dikarenakan proses tidak berjalan dengan disiplin.

"Kenapa evaluasi kita, PTM itu kita tiadakan (di beberapa sekolah), jadi mungkin tidak ada lagi PTM (di beberapa sekolah) karena sekolah itu kadang-kadang satu atau dua sekolah tidak menerapkan proses," kata Haryadi. ■ antara ed: bial ramadhan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005